

ABSTRAK

Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan terhadap adanya transparansi serta akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal penggunaan keuangan, diperlukan adanya suatu konsep pengukuran kinerja yang mampu memberikan gambaran lebih detail mengenai kinerja organisasi yang bersangkutan. Selama ini, pengukuran kinerja yang banyak diterapkan hanya berdasar alat ukur finansial saja. padahal alat ukur finansial sebenarnya kurang dapat memberikan gambaran kinerja secara komprehensif. Terdapat banyak hal yang kurang bisa diterjemahkan dalam ukuran finansial namun sebenarnya memiliki dampak yang signifikan terhadap performa organisasi.

Instansi pemerintah seperti halnya organisasi-organisasi lain baik itu sektor publik maupun swasta juga memerlukan konsep pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dalam rangka mewujudkan *clean and good governance*. Oleh karena itu, diperkenalkanlah suatu konsep pengukuran kinerja yang tergolong baru untuk instansi pemerintah yang diadaptasi dari konsep *Balanced Scorecard*. Metode ini akan menilai kinerja instansi yang bersangkutan berdasar empat perspektif : Perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Penelitian ini membahas tentang simulasi penerapan *Balanced Scorecard* pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKB) Kabupaten Trenggalek. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif, karena selama ini instansi tersebut belum pernah menerapkan *Balanced Scorecard* yang baik. Sedangkan dari perspektif *Scorecard*.

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKB) Kabupaten Trenggalek apabila dinilai dari perspektif keuangan secara umum sudah baik, demikian halnya apabila dinilai dari perspektif pelanggan dan proses internal. Sedangkan kinerja BKKB apabila dinilai dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bisa dikatakan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya staf yang kurang memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, selanjutnya hal ini perlu diberikan perhatian khusus dalam rangka menciptakan layanan terbaik kepada masyarakat.